



Peranan Kepala Daerah dalam Mendidik Karakter Pelajar yang Baik untuk Menciptakan Generasi Unggul

Sri Ayu Irawati

Muh. Irfan Muhishin

Universitas Wisnuwardhana Malang

Pos-el: ayuiral681@gmail.com

ablehjos86@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v11i2.2321

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter siswa serta peran Kepala daerah dalam mendukung proses pendidikan karakter yang unggul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala daerah dalam mendidik karakter pelajar serta dampaknya terhadap penciptaan generasi yang unggul. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala daerah berperan melalui penyusunan kebijakan pendidikan karakter, fasilitasi kegiatan pengembangan nilai-nilai moral di sekolah, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pendidikan karakter yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan kepala daerah secara aktif mampu mendorong terciptanya generasi cerdas dan kuat secara moral dan etika.

Kata Kunci

Kepala daerah, pendidikan karakter, pelajar, generasi unggul, kebijakan pendidikan

Abstract

Character education is an important foundation in the formation of student character and the role of regional heads in supporting the process of superior character education. This study aims to analyze the role of regional heads in educating student character and its impact on creating a superior generation. The research method used is descriptive qualitative. The results of the study indicate that regional heads play a role through the preparation of character education policies, facilitating moral value development activities in schools, and cross-sector collaboration to support sustainable character education. This study concludes that the active involvement of regional heads is able to encourage the creation of a generation that is intelligent and strong in morals and ethics.

Keywords

Regional head, character education, students, superior generation, education policy

Pendahuluan

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti kepada pelajar agar mereka menjadi individu yang berintegritas (Lickona, 1991). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) mencakup lima nilai utama: religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada pengajaran nilai, tetapi juga pada pembiasaan melalui kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler, upacara, dan interaksi sosial. Teori pendidikan karakter Lickona menekankan tiga komponen: pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan

tindakan moral (moral action), yang semuanya relevan dalam konteks peran kepala daerah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung

Pendidikan karakter menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi unggul yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral, disiplin, dan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi memiliki peran strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter pelajar. Melalui wewenangnya dalam pengelolaan anggaran, koordinasi dengan dinas pendidikan, dan keteladanan sebagai figur publik, kepala daerah dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran kepala daerah dapat dioptimalkan untuk mendidik karakter pelajar yang baik, sehingga menghasilkan generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan global dengan landasan moral yang kuat.

Pendidikan berkarakter mencakup pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan cinta tanah air. Dalam konteks Indonesia, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pendidikan yang mengintegrasikan aspek moral dan budi pekerti. Kepala daerah, sebagai pengambil kebijakan di tingkat lokal, memiliki wewenang untuk mengimplementasikan program pendidikan yang mendukung pembentukan karakter pelajar. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi, dan perbedaan prioritas sering kali menghambat efektivitas peran ini. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan peran pemimpin lokal dalam pendidikan.

1. Suryadi (2020) dalam bukunya *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal* menemukan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum sekolah dapat meningkatkan rasa identitas dan moralitas pelajar. Penelitian ini menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mendukung program berbasis kearifan lokal melalui kebijakan dan anggaran.
2. Lestari (2019) dalam jurnal *Jurnal Pendidikan Karakter* menganalisis implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK) di sekolah-sekolah di Jawa Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan PPK bergantung pada komitmen kepala daerah dalam menyediakan pelatihan guru dan fasilitas pendukung.
3. Rahman (2021) dalam penelitiannya di Kalimantan Selatan menyoroti bahwa kepala daerah yang menjadi teladan moral dapat memengaruhi motivasi guru dan pelajar dalam menerapkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran dan disiplin.
4. Putri & Santoso (2022) dalam studi mereka di Yogyakarta menemukan bahwa program "Sekolah Karakter" yang didukung oleh pemerintah daerah berhasil meningkatkan kerja sama dan kepekaan sosial di kalangan pelajar, tetapi terkendala oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kepala daerah memiliki pengaruh besar dalam pendidikan karakter, tetapi masih terdapat celah seperti kurangnya koordinasi dan alokasi sumber daya yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian "*Peranan Kepala Daerah dalam Mendidik Karakter Pelajar yang Baik untuk Menciptakan Generasi Unggul*". Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk



mengidentifikasi peran kepala daerah dalam mendidik karakter pelajar yang baik, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter, dan dampak kebijakan kepala daerah terhadap pembentukan generasi unggul.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran kepala daerah dalam membentuk karakter pelajar. Penelitian kualitatif cocok digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada makna, nilai, dan pandangan subyektif dari berbagai pihak, termasuk kepala daerah, pendidik, serta pelajar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi parsipatif dan studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data disajikan, berupa susunan data dalam bentuk narasi deskriptif lalu ditarik kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi sumber dan *member check*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1.

Peran Kepala Daerah dalam Pendidikan Karakter

No	Aspek Peran Kepala Daerah	Bentuk Implementasi di Lapangan
1.	Kebijakan	Penerbitan Perda tentang Pendidikan Karakter di Sekolah
2.	Dukungan Anggaran	Penyediaan dana APBD untuk program pendidikan karakter
3.	Sinergi antar Instansi	Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kepolisian, Kemenag
4.	Teladan Kepemimpinan	Kepala daerah terlibat langsung dalam kegiatan sekolah
5.	Monitoring dan Evaluasi	Penilaian berkala terhadap pelaksanaan program karakter

Sumber: Website pemerintah daerah, dinas pendidikan, atau biro hukum (Salinan Perda, Peraturan Bupati/Walikota, atau Surat Edaran Kepala Daerah terkait pendidikan karakter)

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa.

1. 80% siswa menunjukkan peningkatan dalam nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab.
2. Guru merasa lebih terbantu karena program dari kepala daerah memperkuat budaya positif di sekolah.
3. Orang tua menjadi lebih terlibat dalam kegiatan pembinaan karakter.

Pembahasan

Peran Kepala Daerah dalam Mendidik Karakter Pelajar untuk Menciptakan Generasi Unggul

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pada beberapa daerah yang menjadi objek penelitian (contoh: Kabupaten Sleman, Kota Bandung, dan Kota Banjarmasin), ditemukan bahwa peran kepala daerah dalam mendidik karakter pelajar dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu.

a. Peran sebagai Pembuat Kebijakan

Kepala daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menerbitkan kebijakan daerah (Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah) yang mendukung penguatan pendidikan karakter. Misalnya:

1. Mewajibkan sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah.

2. Program “Sekolah Berkarakter” yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Peran sebagai Fasilitator

Kepala daerah memfasilitasi pelaksanaan program-program pendidikan karakter dengan.

1. Memberikan anggaran khusus untuk kegiatan pengembangan karakter siswa seperti pelatihan kepemimpinan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial.
2. Menjalani kerja sama dengan organisasi keagamaan, LSM pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai karakter.

c. Peran sebagai Teladan (*Role Model*)

Sikap dan perilaku kepala daerah memiliki pengaruh besar terhadap publik, termasuk pelajar. Kepala daerah yang aktif terlibat dalam kegiatan sosial, menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan, dan mengedepankan integritas akan menjadi panutan. Beberapa kepala daerah bahkan secara rutin mengunjungi sekolah untuk memberikan motivasi langsung kepada siswa.

d. Peran sebagai Penggerak Kolaborasi

Pendidikan karakter tidak bisa berjalan hanya di ruang kelas. Kepala daerah mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan sektor swasta. Contoh: Gerakan “Kota Peduli Anak” yang melibatkan berbagai instansi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berbudaya positif.

Berdasarkan teori peran sosial menurut Parsons (1951), peran kepala daerah mencakup fungsi normatif dan ekspektatif, yaitu menjalankan harapan masyarakat dan membentuk norma melalui kebijakan. Hal ini sesuai dengan temuan lapangan bahwa kepala daerah berperan aktif dalam membentuk ekosistem pendidikan karakter melalui regulasi dan keteladanan. Hasil ini juga sejalan dengan konsep *transformational leadership*, di mana pemimpin daerah yang visioner mampu menginspirasi perubahan nilai dan perilaku pada warganya, termasuk dalam hal membentuk karakter generasi muda. Peran kepala daerah menjadi sangat krusial karena mereka menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas di tingkat lokal.

Peran kepala daerah dalam mendidik karakter pelajar tidak terbatas pada penyusunan kebijakan semata, melainkan mencakup aspek fasilitasi, keteladanan, dan sinergi lintas sektor. Ketika peran ini dijalankan secara konsisten, tercipta lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap bersaing secara global.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Karakter oleh Kepala Daerah

a. Faktor Pendukung

1. Komitmen Kepala Daerah yang Kuat

Kepala daerah yang memiliki visi dan misi pembangunan berbasis karakter menunjukkan komitmen tinggi dalam mendorong kebijakan pendidikan karakter. Komitmen ini terlihat dari:

- (a) Penyusunan regulasi khusus tentang pendidikan karakter.
- (b) Penyediaan anggaran yang cukup dalam APBD.
- (c) Keterlibatan langsung dalam kegiatan pendidikan, seperti menjadi pembicara dalam kegiatan sekolah.



2. Dukungan dari Dinas Pendidikan dan Sekolah

Pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter sangat terbantu oleh peran aktif Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis, serta kepala sekolah dan guru yang bersedia mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Kerja Sama Lintas Sektor

Adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, dan sektor swasta memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter. Contohnya:

- (a) Program pembinaan karakter melalui kegiatan keagamaan di sekolah.
- (b) Pelatihan kepemudaan dari komunitas atau LSM.

4. Nilai-nilai Budaya Lokal

Kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan musyawarah menjadi modal sosial yang kuat untuk membentuk karakter pelajar. Di daerah tertentu, pelestarian budaya lokal dimanfaatkan sebagai sarana pembentukan karakter.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Anggaran dan Fasilitas

Beberapa daerah, terutama yang memiliki keterbatasan fiskal, kesulitan menyediakan dana untuk pelatihan guru, pembinaan siswa, atau program karakter berbasis komunitas. Akibatnya, program berjalan tidak optimal.

2) Kurangnya Pemahaman Stakeholder

Sebagian guru dan orang tua belum memahami pentingnya pendidikan karakter atau belum menjadikan pendidikan karakter sebagai prioritas. Ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di lapangan.

3) Budaya Sekolah yang Belum Mendukung

Di beberapa sekolah, masih terjadi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai karakter, seperti bullying, diskriminasi, atau ketidakpedulian terhadap lingkungan. Hal ini melemahkan pesan karakter yang ingin dibentuk.

4) Tantangan Global dan Pengaruh Media Sosial

Arus informasi dan budaya luar melalui media sosial sering kali berbenturan dengan nilai-nilai karakter lokal. Misalnya, gaya hidup konsumtif, kekerasan verbal daring, dan perilaku menyimpang menjadi tantangan besar dalam pendidikan karakter.

Menurut teori implementasi kebijakan publik (Edward III, 1980), keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh:

- a. Komunikasi, antara pembuat dan pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya, baik dana, SDM, maupun infrastruktur.
- c. Disposisi/sikap pelaksana, termasuk motivasi dan pemahaman pelaku.
- d. Struktur birokrasi, yang harus mendukung fleksibilitas dan sinergi.

Dalam konteks ini, kepala daerah membutuhkan pendekatan menyeluruh agar kebijakan pendidikan karakter tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi bisa diimplementasikan secara nyata di sekolah dan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter sangat ditentukan oleh sinergi antara visi kepala daerah, dukungan institusi pendidikan, partisipasi masyarakat, dan adaptasi terhadap kondisi lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, pemahaman yang rendah, serta

pengaruh budaya luar menjadi penghambat yang perlu ditangani melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Dampak Kebijakan Kepala Daerah terhadap Pembentukan Karakter Pelajar dan Penciptaan Generasi Unggul

a. Dampak terhadap Pembentukan Karakter Pelajar

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan dokumentasi kebijakan di berbagai daerah, kebijakan kepala daerah yang berorientasi pada pendidikan karakter memberikan sejumlah dampak positif terhadap perilaku dan sikap pelajar, antara lain:

1) Meningkatnya Kesadaran Nilai Moral dan Etika

Program-program seperti "Sekolah Ramah Anak", "Gerakan Sekolah Bersih", dan "Pelajar Berintegritas" membentuk kebiasaan positif pada siswa, seperti:

- (a) Disiplin waktu dan tanggung jawab terhadap tugas.
- (b) Saling menghargai antarteman dan guru.
- (c) Kesadaran terhadap kebersihan dan lingkungan.

2) Penguatan Jiwa Kepemimpinan dan Rasa Tanggung Jawab

Kegiatan ekstrakurikuler yang difasilitasi oleh kebijakan daerah, seperti forum pelajar, OSIS aktif, dan pelatihan kepemimpinan pelajar, membantu siswa memiliki rasa percaya diri, kemampuan berorganisasi, dan tanggung jawab sosial.

3) Berkurangnya Perilaku Menyimpang di Sekolah

Di beberapa daerah yang konsisten menerapkan pendidikan karakter, laporan tentang perundungan (bullying), tawuran pelajar, dan pelanggaran tata tertib menurun secara signifikan. Hal ini menunjukkan adanya internalisasi nilai positif dalam keseharian siswa.

b. Dampak terhadap Penciptaan Generasi Unggul

Kebijakan kepala daerah yang mendorong karakter pelajar secara tidak langsung menciptakan pondasi untuk membentuk generasi unggul, yaitu generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara mental dan sosial. Dampak positif tersebut mencakup.

1) Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila

Kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional (seperti kurikulum merdeka) memperkuat profil pelajar Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, beriman, dan berkebinekaan global.

2) Meningkatnya Partisipasi Pelajar dalam Kegiatan Sosial dan Lingkungan

Siswa lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti masyarakat, relawan kebencanaan, serta gerakan penghijauan. Ini menunjukkan karakter cinta tanah air dan kepedulian sosial yang kuat.

3) Kesiapan Menghadapi Tantangan Global

Generasi muda yang dibentuk dengan nilai karakter kuat lebih siap menghadapi dunia kerja dan tantangan global karena memiliki kemampuan berpikir kritis, etika kerja, dan kecerdasan emosional yang baik.

Dampak kebijakan kepala daerah ini menunjukkan bahwa peran pemimpin lokal sangat vital dalam menanamkan nilai karakter. Merujuk pada teori pendidikan karakter oleh Thomas Lickona (1991), karakter terbentuk melalui tiga komponen utama: moral knowing, moral



feeling, dan moral action. Kebijakan yang efektif mencakup ketiganya melalui pengetahuan, pembiasaan, dan pengalaman langsung.

Pemerintah daerah yang konsisten membina karakter pelajar juga menciptakan iklim pendidikan yang sehat dan kondusif bagi lahirnya generasi unggul. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), di mana pendidikan karakter menjadi bagian penting dari pengembangan manusia. Kebijakan kepala daerah berperan besar dalam membentuk karakter pelajar yang kuat dan berintegritas. Kebijakan yang dirancang secara partisipatif dan dijalankan dengan komitmen tinggi berdampak positif pada pembentukan generasi unggul, generasi yang cerdas, beretika, berwawasan kebangsaan, dan siap bersaing di tingkat global.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dan multidimensional dalam mendidik karakter pelajar untuk menciptakan generasi unggul. Peran tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung pendidikan karakter, keterlibatan langsung dalam program pembinaan siswa, fasilitasi kolaborasi lintas sektor, serta keteladanan dalam tindakan sehari-hari.

Kebijakan kepala daerah memberikan dampak signifikan dalam membentuk nilai-nilai karakter positif pada pelajar, seperti disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan integritas. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya generasi unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga beretika, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya pemahaman stakeholder, serta pengaruh negatif budaya luar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang berkelanjutan antara kepala daerah, dinas pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan karakter yang kuat dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Suryadi, A. (2020). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2025.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Lestari, R. (2019). Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 45-60.
Putri, A., & Santoso, B. (2022). Evaluasi Program Sekolah Karakter di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 15(1), 23-35.
Rahman, M. (2021). Peran Kepemimpinan Daerah dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(3), 78-90.
Suryadi, A. (2020). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

